



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2016**

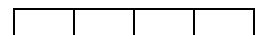
TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lamandau Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177).

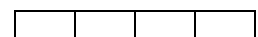
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Lamandau.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
7. Dana Desa selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Perdes.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran Dana Desa kepada desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa di Kabupaten Lamandau.

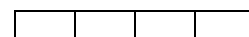
Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rincian dana desa;
- b. penyaluran dana desa;
- c. prioritas penggunaan dana desa; dan
- d. pengelolaan.

BAB II RINCIAN DANA DESA Pasal 4

- (1) Dana Desa Tahun Anggaran 2016 untuk Kabupaten Lamandau berjumlah Rp.53.243.208.000,- (lima puluh tiga milyar dua ratus empat puluh tiga dua ratus delapan ribu rupiah).
- (2) Untuk Pengalokasian Dana Desa dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar sebesar Rp.48.079.400.000,- (Empat Puluh Delapan Milyar Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dari Dana Desa dibagi secara merata kepada 85 (Delapan Puluh Lima) Desa, yang berarti masing-masing desa mendapat Alokasi Dasar sebesar Rp.565.640.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah); dan
 - b. Alokasi Formula sebesar Rp.5.163.808.000,- (Lima Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) dari Dana Desa



dibagi secara proporsional sebesar 2,5% untuk jumlah penduduk, 3,5% untuk angka kemiskinan, 1,0% untuk luas wilayah, dan 3,0 % untuk tingkat kesulitan geografis dari Desa masing-masing.

- (3) Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan tingkat Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada data yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan cara:

$$W = \frac{48.079.400.000}{85} + 5.163.808.000 * [(0,025 * Z1) + (0,035 * Z2) + (0,010 * Z3) + (0,030 * Z4)]$$

Keterangan:

W = DD setiap Desa

K = DD Kabupaten

D = Jumlah Desa se-kabupaten Lamandau

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten

Pasal 6

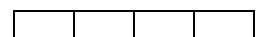
Daftar penerima Dana Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan pencairan per tahap pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada pihak DPPKAD berupa :
 - a. rekomendasi Camat;
 - b. APBDesa Tahun Anggaran 2016; dan
 - c. rencana penggunaan Dana Desa tahap I, II dan III.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dan III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan
 - a. rekomendasi Camat;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.



- (6) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat antara lain :
- a. Peraturan Desa tentang RPJMDesa yang masih berlaku; dan
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2016.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahap terlampir dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Pembangunan Desa
Pasal 9

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi:
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk fasilitas pemerintah desa dan penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau

- e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 10

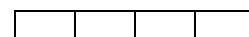
Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan
- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain:

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;

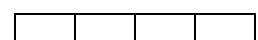


- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa, pendidikan anak usia dini, kelompok masyarakat dan aparat pemerintah desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 12

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau



memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diuraikan dalam Lampiran Pedoman Umum dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pemerintah Menteri dan Lampiran Pedoman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan petunjuk teknis prioritas penggunaan Dana Desa. (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah dan kearifan lokal desa, serta keterbatasan waktu penyelenggaraan perencanaan pembangunan Desa.

BAB V PENGELOLAAN Pasal 14

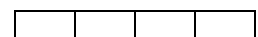
Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 15

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.



Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1), dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI PENUTUP Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Pebruari 2016

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan diNanga Bulik
pada tanggal 23 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



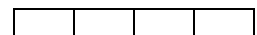
ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2016 NOMOR 438

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELLY YOSSEPH
NIP. 107601312003121006



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 03 TAHUN 2016
 TANGGAL 22 FEBRUARI 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LAMANDAU
 TAHUN ANGGARAN 2016

**DAFTAR PENERIMA DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
 DI KABUPATEN LAMANDAU**

| No. | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Berdasarkan Formula | Pagu Dana Desa per-Desa |
|-----|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3) + (4) |
| 1 | SUNGAI TUAT | 565,640,000 | 98,761,505 | 664,401,505 |
| 2 | TANJUNG BERINGIN | 565,640,000 | 91,870,289 | 657,510,289 |
| 3 | CUHAI | 565,640,000 | 42,059,402 | 607,699,402 |
| 4 | KAWA | 565,640,000 | 64,433,204 | 630,073,204 |
| 5 | KARANG TABA | 565,640,000 | 43,362,292 | 609,002,292 |
| 6 | PENOPA | 565,640,000 | 59,189,391 | 624,829,391 |
| 7 | SUJA | 565,640,000 | 52,336,807 | 617,976,807 |
| 8 | SEKOBAN | 565,640,000 | 62,375,298 | 628,015,298 |
| 9 | BAKONSU | 565,640,000 | 81,362,728 | 647,002,728 |
| 10 | SAMU JAYA | 565,640,000 | 48,121,551 | 613,761,551 |
| 11 | RIAM PANAHAN | 565,640,000 | 59,648,930 | 625,288,930 |
| 12 | SEPOYU | 565,640,000 | 106,270,764 | 671,910,764 |
| 13 | NYALANG | 565,640,000 | 62,657,281 | 628,297,281 |
| 14 | RIAM TINGGI | 565,640,000 | 39,067,769 | 604,707,769 |
| 15 | LANDAU KANTU | 565,640,000 | 38,009,231 | 603,649,231 |
| 16 | LOPUS | 565,640,000 | 118,608,000 | 684,248,000 |
| 17 | KUBUNG | 565,640,000 | 140,396,274 | 706,036,274 |
| 18 | SEKOMBULAN | 565,640,000 | 210,095,027 | 775,735,027 |
| 19 | PENYOMBAAN | 565,640,000 | 86,168,548 | 651,808,548 |

| No. | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Berdasarkan Formula | Pagu Dana Desa per-Desa |
|-----|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3) + (4) |
| 20 | HULU JOJABO | 565,640,000 | 17,014,816 | 582,654,816 |
| 21 | SUNGAI MENTAWA | 565,640,000 | 36,821,656 | 602,461,656 |
| 22 | GUCI | 565,640,000 | 33,434,768 | 599,074,768 |
| 23 | BATU KOTAM | 565,640,000 | 100,319,224 | 665,959,224 |
| 24 | KUJAN | 565,640,000 | 85,335,666 | 650,975,666 |
| 25 | BUNUT | 565,640,000 | 75,973,841 | 641,613,841 |
| 26 | BERUTA | 565,640,000 | 65,550,165 | 631,190,165 |
| 27 | TAMIANG | 565,640,000 | 36,851,603 | 602,491,603 |
| 28 | BUMI AGUNG | 565,640,000 | 62,230,433 | 627,870,433 |
| 29 | SUMBER MULYA | 565,640,000 | 56,135,166 | 621,775,166 |
| 30 | BUKIT INDAH | 565,640,000 | 106,527,770 | 672,167,770 |
| 31 | ARGA MULYA | 565,640,000 | 39,398,160 | 605,038,160 |
| 32 | PERIGI RAYA | 565,640,000 | 16,155,265 | 581,795,265 |
| 33 | NANGA PAMALONTIAN | 565,640,000 | 20,650,770 | 586,290,770 |
| 34 | NANGA PALIKODAN | 565,640,000 | 30,413,434 | 596,053,434 |
| 35 | SUNGKUP | 565,640,000 | 48,385,855 | 614,025,855 |
| 36 | NUANGAN | 565,640,000 | 26,721,909 | 592,361,909 |
| 37 | NANGA KORING | 565,640,000 | 49,058,054 | 614,698,054 |
| 38 | TOKA | 565,640,000 | 31,584,183 | 597,224,183 |
| 39 | SEPONDAM | 565,640,000 | 36,361,437 | 602,001,437 |
| 40 | MERAMBANG | 565,640,000 | 184,728,443 | 750,368,443 |
| 41 | PEDONGATAN | 565,640,000 | 68,104,214 | 633,744,214 |
| 42 | BATU TUNGGAL | 565,640,000 | 127,769,339 | 693,409,339 |
| 43 | NANGA KEMUJAN | 565,640,000 | 23,979,114 | 589,619,114 |

| No. | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Berdasarkan Formula | Pagu Dana Desa per-Desa |
|-----|------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3) + (4) |
| 44 | BUKIT JAYA | 565,640,000 | 72,929,051 | 638,569,051 |
| 45 | SUKA MAJU | 565,640,000 | 44,803,159 | 610,443,159 |
| 46 | MELATA | 565,640,000 | 46,163,681 | 611,803,681 |
| 47 | NANUAH | 565,640,000 | 49,849,751 | 615,489,751 |
| 48 | BATU AMPAR | 565,640,000 | 68,802,599 | 634,442,599 |
| 49 | LUBUK HIJU | 565,640,000 | 64,749,338 | 630,389,338 |
| 50 | TOPALAN | 565,640,000 | 39,549,801 | 605,189,801 |
| 51 | BUKIT MAKMUR | 565,640,000 | 65,832,548 | 631,472,548 |
| 52 | MODANG MAS | 565,640,000 | 52,540,987 | 618,180,987 |
| 53 | BUKIT RAYA | 565,640,000 | 68,304,816 | 633,944,816 |
| 54 | MUKTI MANUNGGAL | 565,640,000 | 77,203,879 | 642,843,879 |
| 55 | SUMBER JAYA | 565,640,000 | 46,377,965 | 612,017,965 |
| 56 | BUKIT HARUM | 565,640,000 | 59,051,879 | 624,691,879 |
| 57 | BINA BHAKTI | 565,640,000 | 49,384,150 | 615,024,150 |
| 58 | WONOREJO | 565,640,000 | 74,496,995 | 640,136,995 |
| 59 | MEKAR MULYA | 565,640,000 | 57,065,594 | 622,705,594 |
| 60 | JANGKAR PRIMA | 565,640,000 | 61,513,696 | 627,153,696 |
| 61 | PURWAREJA | 565,640,000 | 83,796,935 | 649,436,935 |
| 62 | TRI TUNGGAL | 565,640,000 | 57,233,474 | 622,873,474 |
| 63 | BATU HAMBawang | 565,640,000 | 36,841,623 | 602,481,623 |
| 64 | RIMBA JAYA | 565,640,000 | 18,660,152 | 584,300,152 |
| 65 | NANGA BELANTIKAN | 565,640,000 | 44,658,004 | 610,298,004 |
| 66 | SUNGAI BULUH | 565,640,000 | 83,788,463 | 649,428,463 |

| No. | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Berdasarkan Formula | Pagu Dana Desa per-Desa |
|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3) + (4) |
| 67 | TANGGA BATU | 565,640,000 | 50,733,498 | 616,373,498 |
| 68 | BELIBI | 565,640,000 | 57,814,432 | 623,454,432 |
| 69 | BAYAT | 565,640,000 | 154,535,322 | 720,175,322 |
| 70 | KARANG BESI | 565,640,000 | 38,361,661 | 604,001,661 |
| 71 | BENUATAN | 565,640,000 | 33,716,019 | 599,356,019 |
| 72 | KAHINGGAI | 565,640,000 | 63,276,796 | 628,916,796 |
| 73 | NANGA MATU | 565,640,000 | 33,414,450 | 599,054,450 |
| 74 | BINTANG MANGALIH | 565,640,000 | 46,638,362 | 612,278,362 |
| 75 | PETARIKAN | 565,640,000 | 46,164,573 | 611,804,573 |
| 76 | SUMBER CAHAYA | 565,640,000 | 62,781,040 | 628,421,040 |
| 77 | BATU TAMBUN | 565,640,000 | 26,112,003 | 591,752,003 |
| 78 | KINIPAN | 565,640,000 | 45,814,041 | 611,454,041 |
| 79 | GINIH | 565,640,000 | 72,801,644 | 638,441,644 |
| 80 | BENAKITAN | 565,640,000 | 32,328,695 | 597,968,695 |
| 81 | LIKU | 565,640,000 | 26,334,124 | 591,974,124 |
| 82 | MENGGALANG | 565,640,000 | 34,141,308 | 599,781,308 |
| 83 | KARANG MAS | 565,640,000 | 58,729,777 | 624,369,777 |
| 84 | KINA | 565,640,000 | 31,258,981 | 596,898,981 |
| 85 | JEMUAT | 565,640,000 | 40,953,155 | 606,593,155 |
| Total | | 48,079,400,000 | 5,163,808,000 | 53,243,208,000 |

**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Pebruari 2016**


BUPATI LAMANDAU,



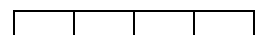
MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 03 TAHUN 2016
 TANGGAL 22 FEBRUARI 2016
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LAMANDAU
 TAHUN ANGGARAN 2016

**RINCIAN PENCAIRAN PER TAHAP DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
 DI KABUPATEN LAMANDAU**

| No. | Nama Desa | Pagu Dana Desa per- Desa | Tahap I | Tahap II | Tahap III |
|-----|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | SUNGAI TUAT | 664,401,505 | 265,760,602 | 265,760,602 | 132,880,301 |
| 2 | TANJUNG BERINGIN | 657,510,289 | 263,004,116 | 263,004,116 | 131,502,058 |
| 3 | CUHAI | 607,699,402 | 243,079,761 | 243,079,761 | 121,539,880 |
| 4 | KAWA | 630,073,204 | 252,029,282 | 252,029,282 | 126,014,641 |
| 5 | KARANG TABA | 609,002,292 | 243,600,917 | 243,600,917 | 121,800,458 |
| 6 | PENOPA | 624,829,391 | 249,931,756 | 249,931,756 | 124,965,878 |
| 7 | SUJA | 617,976,807 | 247,190,723 | 247,190,723 | 123,595,361 |
| 8 | SEKOBAN | 628,015,298 | 251,206,119 | 251,206,119 | 125,603,060 |
| 9 | BAKONSU | 647,002,728 | 258,801,091 | 258,801,091 | 129,400,546 |
| 10 | SAMU JAYA | 613,761,551 | 245,504,621 | 245,504,621 | 122,752,310 |
| 11 | RIAM PANAHAH | 625,288,930 | 250,115,572 | 250,115,572 | 125,057,786 |
| 12 | SEPOYU | 671,910,764 | 268,764,306 | 268,764,306 | 134,382,153 |
| 13 | NYALANG | 628,297,281 | 251,318,913 | 251,318,913 | 125,659,456 |
| 14 | RIAM TINGGI | 604,707,769 | 241,883,108 | 241,883,108 | 120,941,554 |
| 15 | LANDAU KANTU | 603,649,231 | 241,459,692 | 241,459,692 | 120,729,846 |
| 16 | LOPUS | 684,248,000 | 273,699,200 | 273,699,200 | 136,849,600 |
| 17 | KUBUNG | 706,036,274 | 282,414,510 | 282,414,510 | 141,207,255 |

| No. | Nama Desa | Pagu Dana Desa per-Desa | Tahap I | Tahap II | Tahap III |
|-----|----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 18 | SEKOMBULAN | 775,735,027 | 310,294,011 | 310,294,011 | 155,147,005 |
| 19 | PENYOMBAAN | 651,808,548 | 260,723,419 | 260,723,419 | 130,361,710 |
| 20 | HULU JOJABO | 582,654,816 | 233,061,927 | 233,061,927 | 116,530,963 |
| 21 | SUNGAI MENTAWA | 602,461,656 | 240,984,662 | 240,984,662 | 120,492,331 |
| 22 | GUCI | 599,074,768 | 239,629,907 | 239,629,907 | 119,814,954 |
| 23 | BATU KOTAM | 665,959,224 | 266,383,690 | 266,383,690 | 133,191,845 |
| 24 | KUJAN | 650,975,666 | 260,390,267 | 260,390,267 | 130,195,133 |
| 25 | BUNUT | 641,613,841 | 256,645,536 | 256,645,536 | 128,322,768 |
| 26 | BERUTA | 631,190,165 | 252,476,066 | 252,476,066 | 126,238,033 |
| 27 | TAMIANG | 602,491,603 | 240,996,641 | 240,996,641 | 120,498,321 |
| 28 | BUMI AGUNG | 627,870,433 | 251,148,173 | 251,148,173 | 125,574,087 |
| 29 | SUMBER MULYA | 621,775,166 | 248,710,067 | 248,710,067 | 124,355,033 |
| 30 | BUKIT INDAH | 672,167,770 | 268,867,108 | 268,867,108 | 134,433,554 |
| 31 | ARGA MULYA | 605,038,160 | 242,015,264 | 242,015,264 | 121,007,632 |
| 32 | PERIGI RAYA | 581,795,265 | 232,718,106 | 232,718,106 | 116,359,053 |
| 33 | NANGA PAMALONTIAN | 586,290,770 | 234,516,308 | 234,516,308 | 117,258,154 |
| 34 | NANGA PALIKODAN | 596,053,434 | 238,421,374 | 238,421,374 | 119,210,687 |
| 35 | SUNGKUP | 614,025,855 | 245,610,342 | 245,610,342 | 122,805,171 |
| 36 | NUANGAN | 592,361,909 | 236,944,764 | 236,944,764 | 118,472,382 |
| 37 | NANGA KORING | 614,698,054 | 245,879,222 | 245,879,222 | 122,939,611 |
| 38 | TOKA | 597,224,183 | 238,889,673 | 238,889,673 | 119,444,837 |
| 39 | SEPONDAM | 602,001,437 | 240,800,575 | 240,800,575 | 120,400,287 |
| 40 | MERAMBANG | 750,368,443 | 300,147,377 | 300,147,377 | 150,073,689 |
| 41 | PEDONGATAN | 633,744,214 | 253,497,686 | 253,497,686 | 126,748,843 |
| 42 | BATU TUNGGAL | 693,409,339 | 277,363,736 | 277,363,736 | 138,681,868 |

| No. | Nama Desa | Pagu Dana Desa per-Desa | Tahap I | Tahap II | Tahap III |
|-----|---------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 43 | NANGA KEMUJAN | 589,619,114 | 235,847,646 | 235,847,646 | 117,923,823 |
| 44 | BUKIT JAYA | 638,569,051 | 255,427,621 | 255,427,621 | 127,713,810 |
| 45 | SUKA MAJU | 610,443,159 | 244,177,264 | 244,177,264 | 122,088,632 |
| 46 | MELATA | 611,803,681 | 244,721,473 | 244,721,473 | 122,360,736 |
| 47 | NANUAH | 615,489,751 | 246,195,901 | 246,195,901 | 123,097,950 |
| 48 | BATU AMPAR | 634,442,599 | 253,777,040 | 253,777,040 | 126,888,520 |
| 49 | LUBUK HIJU | 630,389,338 | 252,155,735 | 252,155,735 | 126,077,868 |
| 50 | TOPALAN | 605,189,801 | 242,075,920 | 242,075,920 | 121,037,960 |
| 51 | BUKIT MAKMUR | 631,472,548 | 252,589,019 | 252,589,019 | 126,294,510 |
| 52 | MODANG MAS | 618,180,987 | 247,272,395 | 247,272,395 | 123,636,197 |
| 53 | BUKIT RAYA | 633,944,816 | 253,577,926 | 253,577,926 | 126,788,963 |
| 54 | MUKTI MANUNGGAL | 642,843,879 | 257,137,552 | 257,137,552 | 128,568,776 |
| 55 | SUMBER JAYA | 612,017,965 | 244,807,186 | 244,807,186 | 122,403,593 |
| 56 | BUKIT HARUM | 624,691,879 | 249,876,752 | 249,876,752 | 124,938,376 |
| 57 | BINA BHAKTI | 615,024,150 | 246,009,660 | 246,009,660 | 123,004,830 |
| 58 | WONOREJO | 640,136,995 | 256,054,798 | 256,054,798 | 128,027,399 |
| 59 | MEKAR MULYA | 622,705,594 | 249,082,238 | 249,082,238 | 124,541,119 |
| 60 | JANGKAR PRIMA | 627,153,696 | 250,861,478 | 250,861,478 | 125,430,739 |
| 61 | PURWAREJA | 649,436,935 | 259,774,774 | 259,774,774 | 129,887,387 |
| 62 | TRI TUNGGAL | 622,873,474 | 249,149,390 | 249,149,390 | 124,574,695 |
| 63 | BATU HAMBAWANG | 602,481,623 | 240,992,649 | 240,992,649 | 120,496,325 |
| 64 | RIMBA JAYA | 584,300,152 | 233,720,061 | 233,720,061 | 116,860,030 |
| 65 | NANGA BELANTIKAN | 610,298,004 | 244,119,202 | 244,119,202 | 122,059,601 |
| 66 | SUNGAI BULUH | 649,428,463 | 259,771,385 | 259,771,385 | 129,885,693 |

| No. | Nama Desa | Pagu Dana Desa per-Desa | Tahap I | Tahap II | Tahap III |
|--------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 67 | TANGGA BATU | 616,373,498 | 246,549,399 | 246,549,399 | 123,274,700 |
| 68 | BELIBI | 623,454,432 | 249,381,773 | 249,381,773 | 124,690,886 |
| 69 | BAYAT | 720,175,322 | 288,070,129 | 288,070,129 | 144,035,064 |
| 70 | KARANG BESI | 604,001,661 | 241,600,664 | 241,600,664 | 120,800,332 |
| 71 | BENUATAN | 599,356,019 | 239,742,408 | 239,742,408 | 119,871,204 |
| 72 | KAHINGGAI | 628,916,796 | 251,566,718 | 251,566,718 | 125,783,359 |
| 73 | NANGA MATU | 599,054,450 | 239,621,780 | 239,621,780 | 119,810,890 |
| 74 | BINTANG MANGALIH | 612,278,362 | 244,911,345 | 244,911,345 | 122,455,672 |
| 75 | PETARIKAN | 611,804,573 | 244,721,829 | 244,721,829 | 122,360,915 |
| 76 | SUMBER CAHAYA | 628,421,040 | 251,368,416 | 251,368,416 | 125,684,208 |
| 77 | BATU TAMBUN | 591,752,003 | 236,700,801 | 236,700,801 | 118,350,401 |
| 78 | KINIPAN | 611,454,041 | 244,581,617 | 244,581,617 | 122,290,808 |
| 79 | GINIH | 638,441,644 | 255,376,658 | 255,376,658 | 127,688,329 |
| 80 | BENAKITAN | 597,968,695 | 239,187,478 | 239,187,478 | 119,593,739 |
| 81 | LIKU | 591,974,124 | 236,789,649 | 236,789,649 | 118,394,825 |
| 82 | MENGKALANG | 599,781,308 | 239,912,523 | 239,912,523 | 119,956,262 |
| 83 | KARANG MAS | 624,369,777 | 249,747,911 | 249,747,911 | 124,873,955 |
| 84 | KINA | 596,898,981 | 238,759,593 | 238,759,593 | 119,379,796 |
| 85 | JEMUAT | 606,593,155 | 242,637,262 | 242,637,262 | 121,318,631 |
| Total | | 53,243,208,000 | 21,297,283,200 | 21,297,283,200 | 10,648,641,600 |


**Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Pebruari 2016**

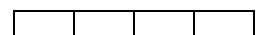
BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING



| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|